

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN LUNANG
TAHUN 2026**



**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



WARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026'

Renja Perubahan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026

Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas- tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Lunang.

Semoga Renja Perubahan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.



Lunang, 13 Juli 2026
KAMAT LUNANG,

DANIEL AGUSTIAN, S.ST., M.CIO.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19830816 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3 Program Dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB V PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II 2026 Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	14
Tabel 2.2	Rekap Capaian Kegiatan Kec. Lunang s.d Triwulan II Tahun 2026	23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	29
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan	35
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan	41
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026	48
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Rencana Perubahan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	52
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

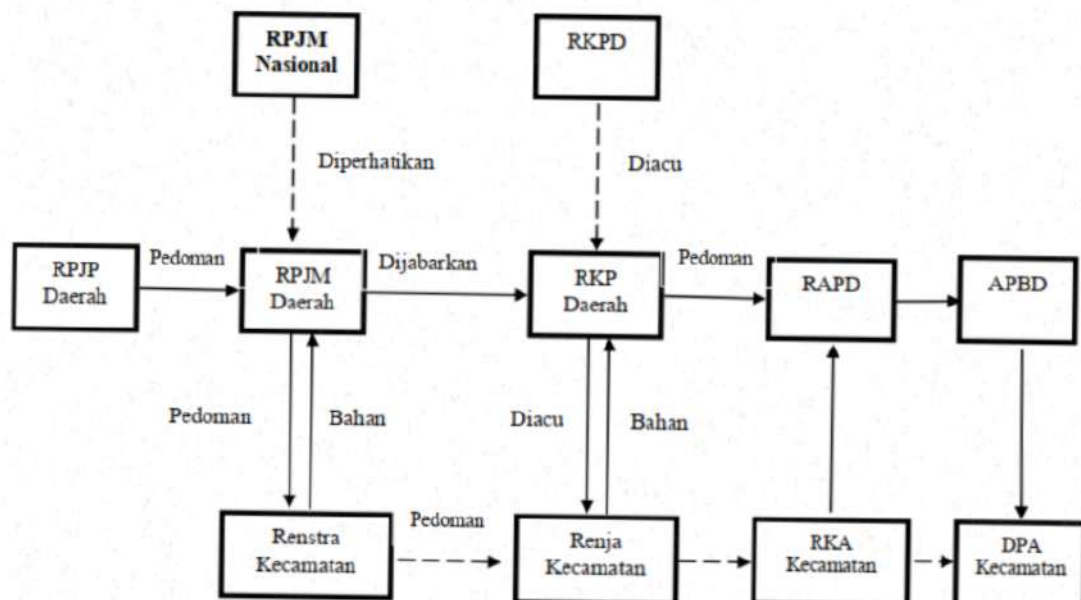
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Renja Kecamatan Lunang Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Lunang Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1: Tahapan Penyusunan Renja Kecamatan Lunang Tahun 2026



Renja Kecamatan Lunang Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mencakup :

1. Penyusunan rancangan Keputusan Camat Lunang tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahunan;
2. Orientasi mengenai Renja Tahunan;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja tahunan.

b. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Lunang, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Lunang, yang menyangkut aspek :

1. Kondisi pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11. Data Pokok Pembangunan Kecamatan Lunang; dan
12. Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Lunang.

c. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
4. Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

d. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

Adapun review hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

e. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal);
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

f. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

g. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

h. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran;

Pengukuran Kinerja (Performance Measurement) tujuan dan sasaran bertujuan untuk menilai kemajuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

i. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, namun dalam proses ini Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

j. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembangunan daerah.

k. Penyajian awal dokumen renja Perangkat Daerah;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

l. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

m. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah;

Penyempurnaan renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

n. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan saran dan masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

o. Penyesuaian dokumen renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen renja Kecamatan Lunang yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
14. Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Lunang ke dalam rencana kerja tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;
3. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2026;
5. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

5.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2026 dan capaian Renstra Kecamatan Lunang, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Senilai Rp. 1.992.475.771,- (Satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) program; 11 (sebelas) Kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp 1.045.299.086,- (Satu miliar empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah.).

Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi kategori sangat tinggi dengan capaian berkisar antara lebih dari 90 sampai dengan 100 persen, tinggi dengan capaian lebih dari 75 sampai dengan 90 persen, sedang dengan capaian lebih dari 65 sampai dengan 75 persen, rendah dengan capaian antara 50 sampai dengan 65 persen, serta sangat rendah dengan capaian di bawah 50 persen.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian kinerja tertinggi adalah 66% (Sedang), yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sementara itu, terdapat 4 (empat) kegiatan dengan kategori capaian 50%-65% (Rendah) adalah : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat masih; Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kemudian, terdapat 6 (enam) kegiatan dengan status capaian di bawah 50% (sangat rendah), yaitu : Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah; kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Untuk capaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terlihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tabel E.60 V3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II 2026
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENTRA sampai dengan RENJA - SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA- SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENTRA s/d tahun 2026 (%)	
								I		II							
1	2	3		4		5		6		7		8		9 = 8		10 = 9/6 x 100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
KECAMATAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA																	
			10.576.022.712		1.636.130.294		1.992.475.771		486.948.539		558.350.547		1.045.299.086		1.045.299.086	22,61	9,88
			9.803.666.925		1.572.518.794		1.855.985.221		461.693.039		540.221.047		1.001.914.086		1.001.914.086	30,03	10,22
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi																30,03	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			104.277.722		-		42.520.000		2.132.000		7.078.000		9.210.000		9.210.000	35	8,83
Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		5		2		1		3		3		60	0
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		1		4		1		1		2		2		10	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			26.625.000		-		21.460.000		405.000		3.462.000		3.867.000		3.867.000	60	14,52
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		5		2		1		3		3		60	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77.652.722		-		21.060.000		1.727.000		3.616.000		5.343.000		5.343.000	10	6,88
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		1		4		1		1		2		2		10	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.830.089.203		1.243.813.378		1.400.995.771		361.901.618		438.878.770		800.580.388		800.580.388	64,09	10,22
Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11		10		11		13		13		13		13		118,18	0
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		6		10	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	
								I		II							
								6		7							
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.534.848.203		1.189.648.378		1.344.475.771		361.901.618		415.128.770		777.030.388		777.030.388	118,18	10,31
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11		10		11		13		13		13		13		118,18	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			295.241.000		54.165.000		56.520.000		-		23.550.000		23.550.000		23.550.000	10	7,98
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		6		10	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.105.000.000		198.731.080		254.541.410		50.159.300		72.370.500		122.529.800		122.529.800	9,17	11,09
Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		1		5	0
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		2		10	0
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan (Paket)	60		12		12		3		3		6		6		10	0
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		2		10	0
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20		0		4		1		1		2		2		10	0
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3		6		6		10	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.500.000		1.755.000		1.177.509		-		290.000		290.000		290.000	5	8,29
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1		1		1		5	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.000.000		29.732.000		1.964.455		735.000		240.000		975.000		975.000	10	16,25
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		2		10	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)			
									I		II							
			1	2	3		4		5		6		7		8		9 = 8	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000.000		20.903.000		22.410.900		5.682.500		5.520.500		11.203.000		11.203.000	10		14,94
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3		3		6		6		10		0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.000.000		6.313.300		4.900.000		1.040.000		1.022.000		2.062.000		2.062.000	10		15,86
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1		2		2		10		0
Fasilitasi Kunjungan Tamu			7.500.000		-		990.000		-		-		-		-	10		0
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		0		4		1		1		2		2		10		0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.000.000.000		140.027.780		223.098.546		42.701.800		65.298.000		107.999.800		107.999.800	10		10,8
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3		6		6		10		0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77.000.000		-		33.684.440		20.650.000		-		20.650.000		20.650.000	8,67		26,82
Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		10		2		0		2		2		4		0
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		3		2		0		2		2		13,33		0
Pengadaan Mebel			28.000.000		-		11.252.000		7.000.000		-		7.000.000		7.000.000	4		25
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		10		2		0		2		2		4		0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49.000.000		-		22.432.440		13.650.000		-		13.650.000		13.650.000	13,33		27,86
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		3		2		0		2		2		13,33		0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA - SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA- SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	
								I		II							
		1	2	3		4		5		6		7		8		9 = 8	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			320.000.000		58.157.038		78.700.000		14.890.121		11.768.777		26.658.898		26.658.898	100	8,33
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		3		3		3		3		100	0
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		1		2		2		2		2		2		100	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.000.000		9.526.148		24.000.000		1.890.121		2.268.777		4.158.898		4.158.898	100	5,55
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		3		3		3		3		100	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			245.000.000		48.630.888		54.700.000		13.000.000		9.500.000		22.500.000		22.500.000	100	9,18
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		1		2		2		2		2		2		100	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			367.300.000		71.817.300		45.543.600		11.960.000		10.325.000		22.285.000		22.285.000	13,33	6,07
Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		1		3		1		1		1		1		33,33	0
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		4		4		1		1		2		2		6,67	0
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		2		1		0		0		0		0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			193.500.000		28.460.300		24.577.600		10.885.000		9.875.000		20.760.000		20.760.000	33,33	10,73
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		1		3		1		1		1		1		33,33	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)				
							I		II								
1	2	3		4		5		6		7		8		9 = 8		10 =9/6 x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.000.000		7.400.000		10.100.000		425.000		450.000		875.000		875.000	6,67	8,73
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		4		4		1		1		2		2		6,67	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			160.800.000		35.957.000		10.866.000		650.000		-		650.000		650.000	0	0,4
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		2		1		0		0		0		0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			207.355.787		6.468.000		22.370.550		7.284.500		2.918.000		10.202.500		10.202.500	30	4,92
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																30	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			207.355.787		6.468.000		22.370.550		7.284.500		2.918.000		10.202.500		10.202.500	30	4,92
Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		2		10	0
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2		0		2		2		1		1		1		50	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			5.000.000		-		1.004.550		182.500		818.000		1.000.500		1.000.500	10	20,01
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	20		0		4		1		1		2		2		10	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			202.355.787		6.468.000		21.366.000		7.102.000		2.100.000		9.202.000		9.202.000	50	4,55
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2		0		2		2		1		1		1		50	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA- SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	
								I		II							
								1	2	3		4		5		6	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
			200.000.000		20.433.500		62.335.000		13.377.000		7.110.000		20.487.000		20.487.000	6,67	10,24
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan																6,67	0
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			175.000.000		20.433.500		62.335.000		13.377.000		7.110.000		20.487.000		20.487.000	10	11,71
Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6		0		10		10		0		0		0		0	0
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10		2		4		1		1		2		2		20	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			25.000.000		5.150.000		20.175.000		8.854.000		100.000		8.954.000		8.954.000	0	35,82
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6		0		10		10		0		0		0		0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			150.000.000		15.263.500		42.160.000		4.523.000		7.010.000		11.533.000		11.533.000	20	7,69
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10		2		4		1		1		2		2		20	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			25.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0
Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50		0		0		0		0		0		0		0	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	
								I		II							
1	2	3		4		5		6		7		8		9 = 8		10 =9/6 x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hdup Bersih dan Sehat		25.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0
	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50		0		0		0		0		0		0		0	0
	Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)																
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			50.000.000		-		10.255.000		1.980.000		2.009.500		3.989.500		3.989.500	10	7,98
Menurunnya Persentase Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum																10	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		50.000.000		-		10.255.000		1.980.000		2.009.500		3.989.500		3.989.500	10	7,98
Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10		0		2		0		1		1		1		10	0
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	20		0		4		1		1		2		2		10	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		25.000.000		-		6.845.000		653.000		1.337.000		1.990.000		1.990.000	10	7,96
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10		0		2		0		1		1		1		10	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d tahun 2026 (%)	
								I		II							
1	2	3		4		5		6		7		8		9 = 8		10 = 9/6 x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			25.000.000		-		3.410.000		1.327.000		672.500		1.999.500		1.999.500	10	8
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	20		0		4		1		1		2		2		10	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			190.000.000		36.710.000		25.550.000		-		1.774.000		1.774.000		1.774.000	5	0,93
Menurunnya potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban																5	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah			190.000.000		36.710.000		25.550.000		-		1.774.000		1.774.000		1.774.000	5	0,93
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang diindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100		0		0		0		0		0		0		0	0
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	20		4		4		0		2		2		2		10	0
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			175.000.000		33.590.000		18.350.000		-		-		-		-	0	0
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100		0		0		0		0		0		0		0	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			15.000.000		3.120.000		7.200.000		-		1.774.000		1.774.000		1.774.000	10	11,83
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	20		4		4		0		2		2		2		10	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			125.000.000		-		15.980.000		2.614.000		4.318.000		6.932.000		6.932.000	6,25	5,55
Meningkatnya Persentase administrasi keuangan dan pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar																6,25	0

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)				
							I		II								
							6		7						8		9 = 8
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			125.000.000		-		15.980.000		2.614.000		4.318.000		6.932.000		6.932.000	6,25	5,55
Jumlah pemerintahan Desa/Nagari yang dibina dan diawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	16		0		4		1		1		2		2		12,5	0
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	10		0		4		0		0		0		0		0	0
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			110.000.000		-		12.700.000		2.614.000		4.318.000		6.932.000		6.932.000	12,5	6,3
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Dese (Dokumen)	16		0		4		1		1		2		2		12,5	0
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			15.000.000		-		3.280.000		-		-		-		-	0	0
Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	10		0		4		0		0		0		0		0	0
																0	0
JUMLAH			10.576.022.712		1.636.130.294		1.992.475.771		486.948.539		558.350.547		1.045.299.086		1.045.299.086		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																22,61	9,88
PREDIKAT																Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber Data : Dealev Kecamatan Lunang Triwulan II Tahun 2026

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Kecamatan Lunang sampai dengan Triwulan II tahun 2026 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rekap Capaian Kegiatan Kec. Lunang s.d Triwulan II Tahun 2026

No.	Uraian Program / Kegiatan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.520.000,00	55	9.210.000,00	21,66
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.400.995.771,00	84,09	800.580.388,00	57,14
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.541.410,00	45,83	122.529.800,00	48,14
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.684.440,00	43,33	20.650.000,00	61,3
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.700.000,00	100	26.658.898,00	33,87
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.543.600,00	27,78	22.285.000,00	48,93
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.370.550,00	50	10.202.500,00	45,61
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62.335.000,00	25	20.487.000,00	32,87
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.255.000,00	50	3.989.500,00	38,9
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.550.000,00	50	1.774.000,00	6,94
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.980.000,00	25	6.932.000,00	43,38
TOTAL		1.992.475.771,00	48,97	1.045.299.086,00	52,46

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, rata-rata capaian kinerja sub kegiatan mencapai 48,97%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.045.299.086,00 atau 52,46% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.992.475.771,00. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang realisasi kinerja maupun keuangannya masih berada di bawah target karena pelaksanaannya dijadwalkan pada semester II atau masih dalam proses administrasi pengadaan dan penyelesaian dokumen pendukung.

Program dengan capaian kinerja tertinggi adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 61,30%. Sementara itu, beberapa kegiatan masih memerlukan percepatan pelaksanaan agar target kinerja dan penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, pada Renja Perubahan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut, analisis terhadap implikasi atau dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Lunang, serta perumusan kebijakan atau langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

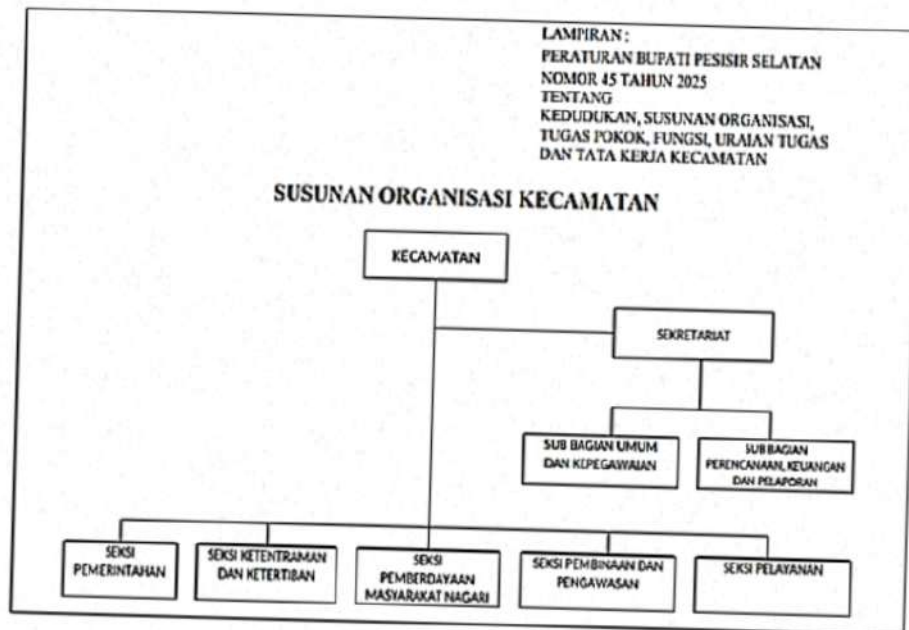
Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau Job Performance dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.



Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari dan kampung
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.

3. Memberikan arahan kepada pemerintahan Nagari untuk membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum di tingkat Nagari.
4. Melakukan pembinaan dalam peningkatan PBB.
5. Kerjasama wilayah perbatasan
6. Penataan pelayanan public dan terpadu di Kecamatan (satu) pintu.
7. Pelaksanaan apel gabungan di kecamatan
8. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat,kursus dalam peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan dan Nagari
9. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
10. Pembinaan kelengkapan administrasi Nagari dan pendampingan dalam membuat APB-Nagari.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)
2. Memfasilitasi,membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
3. Fasilitasi peningkatan produk unggulan Nagari
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
6. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi

5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (Eppgbm)
7. Persentase Konflik yang Diselesaikan

Berikut dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	BB (79,2)	BB (79,2)	BB (79,5)	BB (79,2)	B (63,72)	N/A	N/A	BB (79,5)	BB (79,2)	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	87	87	88	85,45	90,16	91,98	87	88	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan			75	75	78	80	51	94	N/A	78	80	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
4.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	75%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0%	0%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
6.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	2,51%	5,00%	5,00%	4,80%	4,88%	4,80%	N/A	5,00%	4,80%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
7.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target

Sumber Data: Kecamatan Lunang

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2026, realisasi capaian kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang dikeluarkan pada tahun 2025 adalah B (63,72); atau tercapai 80,45%.

Untuk Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Lunang pada tahun 2026 dengan target 75 dan terealisasi 94 atau tercapai 125,33%. Untuk capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dengan target 87 dan terealisasi 90,16 atau tercapai 103,63%. Capaian Indeks Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik Tahun 2025 dengan target 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%.

Indeks Prevalensi Stunting (Eppgbm) dan Indeks Angka Kemiskinan Ekstrim merupakan indikator yang memiliki karakteristik semakin rendah nilainya semakin baik (lower is better). Realisasi Capaian Indeks Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 dengan target 0%, terealisasi 0% atau tercapai 100%. Kemudian Pada tahun 2025 Capaian Indeks Prevalensi Stunting (Eppgbm) dengan target 5,00% , terealisasi 4,80% atau tercapai 104%.

Kemudian untuk Capaian Realisasi Indeks Persentase Konflik yang Diselesaikan pada Tahun 2025, dengan target 100% terealisasi 100% atau tercapai 100%.

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk seluruh sasaran kinerja pemerintah daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, untuk tahun berikutnya Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan akan terus berupaya untuk mempertahankan realisasi kinerja dan menghindari faktor-faktor yang berpotensi menurunkan realisasi kinerja di masa yang akan datang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

a. Kecamatan

Permasalahan Kecamatan Lunang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, yang disebabkan:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;
5. Perencanaan program dan kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga belum terwujudnya pemerintahan yang good governance

Adapun Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Lunang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan

a. Urusan Pencapaian Target PBB-P2 memiliki permasalahan:

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar PBB-P2.
2. Keberadaan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya.
Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam meningkatkan pelayanan wajib pajak.

b. Peraturan Nagari, masalahnya:

Masih rendahnya kepedulian Nagari dalam merumuskan dan membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum bagi nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pemerintahan Nagari tentang pedoman pembuatan peraturan Nagari.

- c. Perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- e. Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

Upaya yang telah dilakukan adalah :

- 1. Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;
- 2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

2. Seksi Ekonomi Pembangunan

Bidang ekonomi pembangunan di Kecamatan Lunang pada umumnya berjalan baik, tetapi di bidang perkoperasian perlu peningkatan pemahaman tentang administrasi.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi bidang pembangunan sehingga memaksimalkan kegiatan pembangunan tersebut.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasakurang
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Upaya yang dilakukan adalah

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas

Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.

- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaiantarget Keluarga Berencana.

2) Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

Dalam satu kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi, Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan telah dipaduselaraskan dan diharmonisasikan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2024 serta visi dan misi gubernur Sumatera Barat dalam rancangan RPJMD Sumbar Tahun 2025-2029.

Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2025-2029 berdampak terhadap capaian program nasional yaitu memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang

Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Peluang

1. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik.
2. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Lunang Tahun 2026 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.4
Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lunang

No	Renja Tahun 2026					Hasil Analisa Perubahan Renja 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lunang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	1.855.985.221	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Lunang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	1.859.265.221	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	42.520.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	38.520.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5 dokumen	21.460.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5 dokumen	19.460.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	21.060.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	19.060.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	1.400.995.771	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	1.400.995.771	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 bulan	1.344.475.771	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 bulan	1.344.475.771	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	56.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	56.520.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	254.541.410	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	259.073.410	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1.177.509	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1.177.509	

No	Renja Tahun 2026					Hasil Analis Perubahan Renja 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	1.964.455	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	1.964.455	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	22.410.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	22.410.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Lunang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4.900.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Lunang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4.900.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	990.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	223.098.546	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	228.620.546	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.684.440	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	35.432.440	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	11.252.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Lunang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	7.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	22.432.440	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.432.440	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	65.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	11.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	54.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	54.700.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	45.543.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	59.543.600	

No	Renja Tahun 2026					Hasil Analis Perubahan Renja 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lunang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	24.577.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lunang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	34.577.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 unit	10.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 unit	7.100.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10.866.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lunang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	17.866.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lunang	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	85%	22.370.550	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lunang	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	85%	21.370.550	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 bulan	22.370.550	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 bulan	21.370.550	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 dokumen	1.004.550	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 dokumen	1.004.550	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Dokumen	21.366.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Dokumen	20.366.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lunang	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	100 %	62.335.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lunang	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	100 %	63.335.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lunang	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	100%	62.335.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lunang	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	100%	63.335.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	20.175.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	20.175.000	

No	Renja Tahun 2026					Hasil Analisa Perubahan Renja 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	42.160.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	43.160.000	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%	10.255.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%	10.255.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	10.255.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	10.255.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.845.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.845.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	3.410.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lunang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	3.410.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lunang	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	25.550.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lunang	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	25.550.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25.550.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lunang	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25.550.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	18.350.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lunang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	18.350.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 dokumen	7.200.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lunang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 dokumen	7.200.000	

No	Renja Tahun 2026					Hasil Analisa Perubahan Renja 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	15.980.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	12.700.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah pemerintahan Desa/Nagari yang dibina dan diawasi	10 Nagari	15.980.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah pemerintahan Desa/Nagari yang dibina dan diawasi	10 Nagari	12.700.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	12.700.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	12.700.000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 dokumen	3.280.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lunang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 dokumen	0	
	Jumlah				1.992.475.771	Jumlah				1.992.475.771	

Sumber Data : Kecamatan Lunang 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana penjangkauan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Lunang. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Lunang berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan pada saat musrenbang tingkat Kecamatan Lunang Tahun 2025 adalah sebagai tabel 2.5. berikut:

Tabel T-C 32 Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pesisir Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Lunang

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	VOLUME	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	CATATAN VERIFIKASI	REKOMENDASI (LAYAK/TIDAK LAYAK)	NILAI (50-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tergenangnya halaman Sekolah saat hujan turun.	Penanggulangan Banjir di SDN 01 Rantau Ketaka	Guru/Siswa	1 Paket	50.000.000	Dinas Pendidikan	Buatkan DED/RAB kegiatannya	Layak	75
2	Masih kurangnya minat baca di tingkat masyarakat	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Masyarakat	1 Paket	100.000.000	Dinas Kearsipan dan Pustaka	Lengkapi dengan Proposal kegiatan	Layak	75
3	Hasil Pertanian/Perkebunan Masyarakat dibawa menyeberangi sungai menuju rumah.	Pembangunan Jembatan Gantung Menuju Lahan Pertanian	Masyarakat, Kelompok Tani	1 Unit	500.000.000	Dinas PUPR	Buatkan DED/RAB kegiatannya	Layak	80
4	Memperlancar akses masuk untuk aktivitas RMP	Rabat Beton Jalan RMP.	Kelancaran RMP	250 M	250.000.000	Dinas PUPR	Buatkan DED/RAB kegiatannya	Layak	80
5	Terjadi banjir di pemukiman masyarakat Nagari Lunang Barat akibat debit air Sungai Batang Lunang tinggi disaat curah hujan tinggi.	Perbaikan Tanggul Sungai Batang Lunang	Masyarakat	500 M	250.000.000	Dinas PUPR	Koordinasi dengan dinas terkait	Layak	85
6	Belum terdapat ruang pertemuan yang memadai untuk acara pertemuan tingkat kecamatan dan juga sebagai tempat ruang pajang hasil UMKM masyarakat Lunang.	UDKP Kecamatan Lunang	Masyarakat	1 Paket	800.000.000	Dinas PUPR	Koordinasi dengan dinas terkait	Layak	85

Sumber Data : Musrenbang Kecamatan Lunang Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Lunang adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 mengacu pada visi dan misi Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan serta selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 adalah:

"PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN"

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut: Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Maju:** Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- b) **Tumbuh:** Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
- c) **Berkelanjutan:** Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

➤ **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”.**

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

➤ **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.**

Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu

yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

➤ **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”.**

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

➤ **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”.**

Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

➤ **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”.**

Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke 1 (Satu) yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**,

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2026 yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
- b. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2026
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Lunang	BB (79,2)
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
			Nilai Kematangan Inovasi	78
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	- Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik	100%
			- Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
			- Prevalensi Stunting (EPPGM)	5,00%
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	100%

Sumber Data : Renstra Kecamatan Lunang Tahun 2025-2029

3.3. Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2026:

Jumlah Program	: 6 (enam)
Jumlah Kegiatan	: 11 (sebelas)
Jumlah Sub Kegiatan	: 27 (dua puluh tujuh)
Pagu Indikatif APBD	: Rp 1.992.475.771,- (Satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Fasilitas Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.33. Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
Rencana Perubahan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Kecamatan Lunang	100%	1.859.265.221	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1.836.175.771
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kecamatan Lunang	100%	38.520.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	30.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kecamatan Lunang	5 dokumen	19.460.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 dokumen	15.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Lunang	4 dokumen	19.060.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 dokumen	15.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kecamatan Lunang	100%	1.400.995.771	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1.401.475.771
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Lunang	11 bulan	1.344.475.771	Dana Alokasi Umum (DAU)		11 bulan	1.344.475.771
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Lunang	12 dokumen	56.520.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	57.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lunang	100%	259.073.410	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	225.800.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Lunang	4 paket	1.177.509	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 paket	1.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Lunang	4 paket	1.964.455	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 paket	1.100.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Lunang	12 paket	22.410.900	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 paket	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Lunang	4 paket	4.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 paket	2.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Lunang	4 laporan	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 laporan	1.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Lunang	12 laporan	228.620.546	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 laporan	200.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	100%	35.432.440	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	38.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Lunang	10 Unit	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Unit	15.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lunang	3 Unit	28.432.440	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Unit	23.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lunang	100%	65.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	79.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lunang	3 Laporan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lunang	2 laporan	54.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 laporan	54.700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik	Kecamatan Lunang	100%	59.543.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	61.200.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Lunang	3 unit	34.577.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 unit	38.700.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Lunang	4 unit	7.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 unit	2.500.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Lunang	2 unit	17.866.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 unit	20.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	Kecamatan Lunang	85%	21.370.550	Dana Alokasi Umum (DAU)		85%	31.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lunang	12 bulan	21.370.550	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	31.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Lunang	4 dokumen	1.004.550	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 dokumen	1.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lunang	2 Dokumen	20.366.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	30.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Kecamatan Lunang	100 %	63.335.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	55.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Kecamatan Lunang	100%	63.335.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	50.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Lunang	10 Lembaga	20.175.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Lembaga	5.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	4 laporan	43.160.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 laporan	45.000.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Lunang	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	5.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Lunang	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		80 Keluarga	5.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kecamatan Lunang	100%	10.255.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	20.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lunang	100%	10.255.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	20.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lunang	2 Laporan	6.845.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan	10.000.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lunang	4 Laporan	3.410.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	10.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kecamatan Lunang	100 %	25.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	18.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Lunang	100%	25.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	18.000.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kecamatan Lunang	100 orang	18.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 orang	15.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan Lunang	4 dokumen	7.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 dokumen	3.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Lunang	100 %	12.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	25.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan Desa/Nagari yang dibina dan diawasi	Kecamatan Lunang	10 Nagari	12.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Nagari	25.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lunang	4 dokumen	12.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 dokumen	22.000.000
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Lunang	4 dokumen	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 dokumen	3.000.000
Jumlah					1.992.475.771				1.985.175.771

Sumber Data : Kecamatan Lunang 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Lunang kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Lunang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lunang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Tabel TC-27

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Lunang	Nilai AKIP Kecamatan Lunang	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		100%	1.859.265.221	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100%	38.520.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		5 dokumen	19.460.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		4 dokumen	19.060.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	1.400.995.771	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		11 bulan	1.344.475.771	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dokumen	56.520.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	259.073.410	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		4 paket	1.177.509	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4 paket	1.964.455	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Progran (Out come dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 paket	22.410.900	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		4 paket	4.900.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		4 laporan	0	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 laporan	228.620.546	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	35.432.440	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	7.000.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	28.432.440	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	65.700.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	11.000.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 laporan	54.700.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	59.543.600	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		3 unit	34.577.600	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Progran (Out come dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 unit	7.100.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	17.866.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Kematangan Inovasi	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan		85%	21.370.550	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Teriaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		12 bulan	21.370.550	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		4 dokumen	1.004.550	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2 Dokumen	20.366.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	- Angka Kemiskinan Ekstrem - Prevalensi Stunting (EPPGM)	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		100 %	63.335.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan		100%	63.335.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10 Lembaga	20.175.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 laporan	43.160.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0	0	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0	0	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	10.255.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan Desa/Nagari yang dibina dan diawasi		100%	10.255.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2 Laporan	6.845.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		4 Laporan	3.410.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas Tinggi	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana		100 %	25.550.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	25.550.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100 orang	18.350.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 dokumen	7.200.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		100 %	12.700.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang diindaklanjuti		10 Nagari	12.700.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		4 dokumen	12.700.000	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
			7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan		4 dokumen	0	Kec. Lunang	Kab. Pesisir Selatan
Jumlah								1.992.475.771		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah.

Selain memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2026, dokumen Renja ini juga menggambarkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam proses penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun secara sistematis melalui proses perencanaan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, substansi Dokumen Renja ini tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan kondisi strategis, keadaan kahar (*force majeure*), maupun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan

adanya penyempurnaan. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjamin konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan,

2026

BUPATI PESISIR SELATAN

